

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. P. Parlindungan. 1999. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997)*. Mandar Maju: Bandung.
- Adrian Sutedi. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman. 2020. *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*. STPN Press: Yogyakarta.
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan*. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- , 2004. *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 2*. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Benedetta Cappiello dan Gherardo Carullo. 2021. *Blockchain, Law and Governance*. Springer Nature Switzerland AG: Switzerland.
- Boedi Harsono. 2007 *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas. Djambatan: Jakarta.
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan Dan Revisi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2016*. Refika Aditama: Bandung.
- , 2014. *Teori Hukum Konvergensi*. Refika Aditama: Bandung.
- Edmon Makarim. 2013. *Buku Seri Hukum Telematika: Notaris dan Transaksi Elektronik*, Edisi Kedua. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Elza Syarif. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta.
- FX Sumarja. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Penerbit Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- John M. Echols dan Hasan Shadily. 1994. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia: Jakarta.

- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*. Tatanusa: Jakarta.
- Judhariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. PT Raja Grafindo Perkasa: Jakarta.
- Lee A. Bygrave. 2014. *Data Privacy Law An International Perspectives*. Oxford University Press: Oxford, United Kingdom.
- Maria S. W. Sumardjono. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Cet. 3. Penerbit Buku Kompas: Jakarta.
- , 2009. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Penerbit Buku Kompas: Jakarta.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber crime) Suatu Pengantar*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Alumni: Bandung
- Nuraini Aisyah, dkk. *Peran Asisten Surveyor Kadaster (ASK) Pada Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah*. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis. STPN Press: Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- , 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. PT. Bina Ilmu: Surabaya.
- , 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- , 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Penerbit Universitas Trisakti: Jakarta.
- Pierre Legrand. 1996. *European Legal Systems Are Not Converging*". 45 Int'l & Comp. L.Q. 55.
- Riduan Syahrani. 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sadjijono. 2008. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo: Yogyakarta.
- Santoso Urip. 2012. *Hukum Agraris: Kajian Komprehensif*, Cetakan I. Kencana: Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sinta Dewi. 2009. *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran: Bandung.
- , 2015. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Refika Aditama: Bandung.
- Serjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Syahrudin Nawi. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pertanahan*. CV. Fharras Jaya Grafika: Makassar.
- Tim Penyusun Paper Kebijakan. 2017. *Paper Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jakarta.
- Wahyuni, dkk. 2017 *Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSLI) Di Provinsi Sumatera Utara*. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis. STPN Press: Yogyakarta.

Tesis

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Aulia Citra. *Keabsahan Dokumen Elektronik Pengesahan Badan Hukum Yayasan oleh Kemenkumham Secara Elektronik*. Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Indonesia.

Jurnal

- Ana Silviana. 2021. *Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia*. *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 4, Nomor 1.
- Arif Rahman Hakim dan Muammar Alay Idrus. 2021. *Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah*. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Volume 3, Nomor 1.
- Bart Custers dan Lara Overwater. 2019. *Regulating Initial Coin Offerings and Cryptocurrencies: A Comparison of Different Approaches in Nine Jurisdictions Worldwide*. *European Journal of Law and Technology*, Volume 10 Issue 3.
- Danrivanto Budhijanto. 2011. *Pembentukan Hukum Yang Antisipatif Terhadap Perkembangan Zaman Dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 2.
- Doni Prayugo Agung Pribadi dan Arie Eko Wardoyo,. *Pengembangan Quick Response Code Pada Pelabelan Dokumen Sertifikat Tanah Menggunakan Algoritma Rsa Berbasis Servis*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Dian Aries Mujiburohman. 2021. *Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik*. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Volume 7, Nomor 1.
- Edmon Makarim. 2015. *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4.
- Evelyn Angelita Pinondang Manurung dan Eka Ayu Purnama Lestari. 2020. *Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis QR-Code dalam E-Commerce*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, Volume 4, Nomor 1.
- Harris Yonatan Parmahan Sibuea. 2011. *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*. *Jurnal Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2.
- Joshua P Nugraha, dkk. 2022. *Penerapan Blockchain untuk Pencegahan Sertipikat Tanah Ganda di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*. *Jurnal Widya Bhumi*, Volume 2, Nomor 2.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *White Paper Pengelolaan Pertanahan Nasional*.

M. Shanthi dan R. Euphrasia. 2016. *Data Security Through QR Code Encryption and Steganography. Advanced Computing: An International Journal (ACIJ)*.

Masoud Alajmi,dkk. 2020. *Steganography of Encrypted Messages Inside Valid QR Codes. IEEE Access*, Volume 6.

Mudakir Iskandar Syah. 2014. *Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 4, Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. 2015. *Lembaga Penjaminan Dalam Pendaftaran Tanah Sistem Negatif Untuk Memberikan Kepastian Hukum Atas Tanah*.

Rosalinda Elsin Latumahina. 2014. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. GEMAAKTUALITA, Volume 3, Nomor 2.

Syofyan Hadi dan Tomy Michael. 2017. *Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*. Jurnal Cita Hukum, Volume 5, Nomor 2.

Yubaidi, R. S. 2020. *The Future of Land Ownership Regulation in Indonesia*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(6).

Instrumen Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertifikat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penerapan *2D Barcode* Dalam Pengawasan Obat Dan Makanan

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran

Sumber Internet

Administrator. *Apa itu SPBE di Pemerintahan?*, diakses pada <https://diskominfo.kedirikab.go.id/baca/apa-itu-spbe-di-pemerintahan#:~:text=SPBE%20merupakan%20singkatan%20dari%20Sistem,memberikan%20layanan%20kepada%20Pengguna%20SPBE.>

Adhyasta Dirgantara. *Data Peduli Lindungi Bocor, Pemerintah Diminta Tak Saling Lempar Tanggung Jawab*, diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/05230361/data-pedulilindungi-bocor-pemerintah-diminta-tak-saling-lempar-tanggung.>

Ady Thea DA. *6 Kritik KPA untuk Kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-kritik-kpa-untuk-kebijakan-sertipikat-tanah-elektronik-lt601d3bfeb8060/?page=all.>

Ardiansyah Fadli. *Baru 82 Juta Bidang Tanah Tersertifikasi*, diakses pada <https://properti.kompas.com/read/2020/12/10/164926321/baru-82-juta-bidang-tanah-tersertifikasi.>

Akhiruddin. *Sertipikat Elektronik Upaya Mengamankan Aset Negara*, diakses pada [https://kabarnotariat.id/2021/03/03/sertipikat-elektronik-upaya-mengamankan-aset-negara/.](https://kabarnotariat.id/2021/03/03/sertipikat-elektronik-upaya-mengamankan-aset-negara/)

Ardiansyah Fadli. *Sepanjang 2020 Konflik Agraria 241 Kasus, Tertinggi Sektor Perkebunan*, diakses pada <https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/06/160000521/sep-anjang-2020-konflik-agraria-241-kasus-tertinggi-sektor-perkebunan>

BBC. *Sertifikat tanah elektronik: Bagaimana penerapan, keamanan, dan sanksi terhadap yang menolak?*, diakses pada <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55907277>

Cekindo. *QR Code in Pharmaceutical, Cosmetic and Food Products in Indonesia*, diakses pada <https://www.cekindo.com/blog/qr-code->

products-indonesia#the-implementation-of-qr-code-in-products-in-indonesia.

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN. *Sertipikat Elektronik Menuju Pelayanan Pertanahan Modern Berstandar Dunia*, diakses pada <https://ppid.kamparkab.go.id/public/dokumen/2021/02/6d2a83cfe4f546e402919cd76077e589.pdf>.

Desiana Wahyuningsih. *Sekilas Mengenai Aplikasi Sentuh Tanahku*, diakses pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/12931/Sekilas-Mengenai-Aplikasi-Sentuh-Tanahku.html>

Hamalatul Qurani. *Masalah Keamanan Data Pengguna QR Code PeduliLindungi Dibawa ke PTUN*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-keamanan-data-pengguna-qr-code-pedulilindungi-dibawa-ke-ptun-lt62ee2b7ac6930/>.

Herman. *KPA Catat 207 Konflik Agraria Sepanjang 2021*, diakses pada <https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021>.

Iam Waqas. *Risks of Using QR Codes and How To Mitigate it – Not As Safe as You Think*, diakses pada <https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/qr-code-risks>

Ihsanira Dhevina E. *E-Government: Inovasi dalam Strategi Komunikasi*, diakses pada https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi.

IndoTelko. *QR Code berpotensi bahaya, ini tips dari ITSEC*, diakses pada <https://www.indotelko.com/read/1647707450/qr-code-berpotensi-bahaya-ini-tips-dari-itsec>.

Insi Nantika Jelita. *Sertifikat Tanah Elektronik, Aset Barang Milik Negara Jadi Target Pertama*, diakses pada <https://mediaindonesia.com/ekonomi/563630/sertifikat-tanah-elektronik-aset-barang-milik-negara-jadi-target-pertama>.

Kaspersky. *QR Code Security: What Are QR Codes And Are They Safe To Use?*, diakses pada <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-a-qr-code-how-to-scan>.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Cari Layanan*, diakses pada <https://www.atrbpn.go.id/cari-layanan>.

Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, diakses pada https://www.kominfo.go.id/content/detail/32594/disinformasi-bpn-dalam-waktu-dekat-akan-tarik-semua-sertifikat-tanah-milik-masyarakat-untuk-diganti-menjadi-sertifikat-elektronik/0/laporan_isu_hoaks.

Koran Investor Daily. *Blockchain Melawan Mafia Tanah*, diakses pada <https://brain.ipb.ac.id/2023/03/30/blockchain-melawan-mafia-tanah/>

Morey Haber. *I Don't Scan QR Codes, And Neither Should You*, diakses pada <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/06/01/i-dont-scan-qr-codes-and-neither-should-you/?sh=113465b951d1>.

Muhdany Yusuf Laksono. *Siap-siap, Sertifikat Tanah Elektronik Mulai Diterbitkan April 2023*, diakses pada <https://www.kompas.com/properti/read/2023/03/08/140000221/siap-siap-sertifikat-tanah-elektronik-mulai-diterbitkan-april-2023>.

Nadiyah Rahmalia, *QR Code: Apa Itu, Bagian, Jenis-Jenis, dan Cara Membuatnya*, diakses pada <https://glints.com/id/lowongan/qr-code-adalah/>.

Naufal Ridhwan. *Serba-Serbi Ancaman Phishing Kode QR, Pakar Siber Beberkan Risiko hingga Cara Main Pelaku*, diakses pada https://bisnis.tempo.co/read/1714068/serba-serbi-ancaman-phishing-kode-qr-pakar-siber-beberkan-risiko-hingga-cara-main-pelaku?page_num=1.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, *Modul III: Sengketa dan Perkara dalam Pengadaan Tanah*, diakses pada DASAR-DASAR PEMERINTAHAN (stpn.ac.id).

Tim Editorial Rumah.com. *4 Cara Cek Sertifikat Tanah Terbaru 2023*, diakses pada <https://www.rumah.com/panduan-properti/cara-cek-sertifikat-69790>,

Wicaksana Dramada. *Apakah Hak Atas Privasi Termasuk HAM?*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham/>

Lainnya

Ahmad M. Ramli. 2010. Laporan Singkat Komisi I DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Pembentukan RUU Konvergensi Telematika.

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, *Sertipikat Elektronik Menuju Pelayanan Pertanahan Modern Berstandar Dunia*.

G. Baralla, A. Pinna dan G. Corrias. 2019. *Ensure Traceability in European Food Supply Chain by Using a Blockchain System*. *IEEE/ACM 2nd International Workshop on Emerging Trends in Software Engineering for Blockchain (WETSEB)*.

Isy Karimah Syakir. *Peran dan Tugas PPAT Menghadapi Tantangan di Era Digitalisasi*. Disampaikan pada Webinar Siapkah Profesi PPAT Menghadapi Era Digitalisasi Pelayanan Bidang Pertanahan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Kenotariatan (HIMANAIR) Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, pada tanggal 28 Agustus 2021.

Sosialisasi Sertipikat Elektronik, Pelayanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik Serta Peran Serta PPAT Selaku Pengguna Layanan disampaikan pada Seminar Daring IPPAT Komwil Jawa Barat Pusat Data Dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang Dan LP2B Kementerian ATR/BPN.

Urip Santoso. *Kepastian Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewenangannya Secara Elektronik*. Disampaikan pada Webinar Siapkah Profesi PPAT Menghadapi Era Digitalisasi Pelayanan Bidang Pertanahan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Kenotariatan (HIMANAIR) Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, pada tanggal 28 Agustus 2021.

Wawancara dengan EP yang menjabat sebagai Analis Hukum Pertanahan di Kantor BPN Kota Makassar, pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 10:37 WITA, di Kota Makassar.

Wawancara dengan IR yang menjabat sebagai Penata Pertanahan Pertama di Kantor BPN Kabupaten Gowa, pada tanggal 19 Juni 2023, pukul 15.15 WITA, di Kabupaten Gowa